ABSTRAK PERATURAN

TATACARA PENYEDIAAN – PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT KELAS EKONOMI - PENYELENGGARAAN
2021

PERMENKEU RI NOMOR 157/PMK.02/2010 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.430)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan
pertanggungjawaban dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut
untuk penumpang kelas ekonomi, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan, pencairan, dan
pertanggungjawaban dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut
untuk penumpang kelas ekonomi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 123/PMK.02/2009.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70,
TLN No.4287), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun
2004 No.66, TLN No.4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana
telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), PP 21 Tahun 2004 (LN
Tahun 2004 No.75, TLN No.4406), PP 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.117, TLN No.4556), PP 8
Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73,
TLN No.4212) sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.92,
TLN No.4418), Perpres Ri 51 Tahun 2009, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI
134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 82/PMK.05/2007, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu
RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2007, Permenkeu RI 119/PMK.02/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi adalah
kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana
diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
pengelolaannya ditugaskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagai
pelaksana *Public Service Obligation* (PSO). Dana untuk keperluan penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pelaksanaan Kewajiban
Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Menteri Keuangan
selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku KPA bertanggung jawab atas
penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk
Penumpang Kelas Ekonomi kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Dalam rangka
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk
Penumpang Kelas Ekonomi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan dapat
membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 123/PMK.02/2009, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 September 2021.

- Lampiran halaman 1-3.